

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PADA ORGANISASI RISET PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)**

Disusun oleh:

NAMA : RITA NUR PRATIWI
NOMOR POKOK : 2143021111
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
JAKARTA**

2024

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : RITA NUR PRATIWI
NPM : 2143021111
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Implementation of the Internal Control System at the Aeronautics and Space Research Organization of the National Research and Innovation Agency (BRIN)*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr.R.N. Afsdy Saksono, M.Sc

**Prof.Dr. R. Luki Karunia,
S.E.Ak.MA CA.CACP**

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : RITA NUR PRATIWI
NPM : 2143021111
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Implementasi Sistem Pengendalian Intern pada
Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN)

Telah mempertahankan tesis ini dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juli 2024
Waktu : 14.30 s.d 16.00 wib

TELAH DINYATAKAN LULUS

Penguji Tesis

Ketua Sidang : **Dr. Edy Sutrisno, M.Si**

Sekretaris : **Arifiani Widjayanti, SP, M.Si, Ph.D**

Anggota : **Dr. Hidayaturahmi, S.Sos, MPA**

Pembimbing I : **Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc**

Pembimbing II : **Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E.Ak.
MA.CA.CACP**



SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RITA NUR PRATIWI
NPM : 2143021111
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **“Implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Organisasi Riset Penerbangan Antariksa di Badan Riset dan Inovasi Nasional”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Juli 2024



Rita Nur Pratiwi
NPM 2143021111

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Terapan pada Administrasi Pembangunan Negara. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, semangat serta masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc selaku Dosen pembimbing, yang telah memberikan masukan-masukan dalam hal teknis dan materi penulisan;
2. Bapak Prof.Dr. R. Luki Karunia, S.E.Ak.MA CA.CACP, selaku Dosen pengajar dan pembimbing yang telah memberikan banyak masukan-masukan serta semangat dalam hal teknis dan materi penulisan;
3. Dr. Edy Sutrisno, M.Si yang pada saat pengujian telah memberikan masukan-masukan untuk penyusunan tesis ini;
4. Arifiani Widjayanti, SP, M.Si, Ph.D yang pada saat pengujian telah memberikan masukan-masukan untuk penyusunan tesis ini;
5. Dr. Hidayaturahmi, S.Sos, MPA yang pada saat pengujian telah memberikan masukan-masukan untuk penyusunan tesis ini;
6. Kedua orang tua saya Bapak Prof. Ir. Ilham Hatta Manangkasi, MT.APU dan Ibu Rosjayati Mustafa serta seluruh keluarga yang terus memberikan doa, dukungan dan semangat yang sangat berharga;
7. Keluarga besar Auditor BRIN dan seluruh pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 19 Juli 2024



Rita Nur Pratiwi
NPM 2143021111

ABSTRAK

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Rita Nur Pratiwi, R.N. Afsdy Saksono, R.Luki Karunia

pratiwi1803@gmail.com

Politeknik STIA-LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP tersebut. Selanjutnya, penelitian ini berupaya membangun SPIP baru yang dinilai lebih efektif untuk diimplementasikan di lingkungan ORPA BRIN sebagai upaya memperbaiki implementasi SPIP yang telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara, telaah dokumen, observasi, dan triangulasi dengan membandingkan data-data yang didapatkan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SPIP di lingkungan ORPA BRIN belum optimal karena masih memiliki sedikitnya 3 kekurangan dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian. Selain itu, implementasi SPIP di ORPA BRIN juga masih terkendala oleh 4 persoalan utama yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung implementasi SPIP, kurangnya kesadaran dalam menjaga dan mengimplementasikan pengelolaan dan pengamanan aset, dan kurangnya akurasi informasi laporan keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPIP tersebut, penelitian ini merekomendasikan model SPIP baru yang berisi 58 upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan SPIP. Dari upaya-upaya tersebut, terdapat 16 upaya baru yang merupakan penyempurnaan dari model SPIP yang telah diimplementasikan oleh ORPA BRIN selama ini.

Kata Kunci: Penilaian Risiko, Pengelolaan Aset, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Organisasi

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

ABSTRACT

Implementation of the Government Internal Control System at the Aeronautics and Space Research Organization of the National Research and Innovation Agency (BRIN)

Rita Nur Pratiwi, R.N. Afsdy Saksono, R.Luki Karunia

pratiwi1803@gmail.com

Politeknik STIA-LAN Jakarta

This study aims to analyze the implementation of the government's internal control system (SPIP) within the aviation and space research organization (ORPA) of the National Research and Innovation Agency (BRIN) by examining the factors that affect the implementation of the SPIP. Furthermore, this study seeks to build a new SPIP that is considered more effective to be implemented in BRIN's ORPA environment as an effort to improve the implementation of SPIP that has been implemented. This study uses a qualitative research method with a case study design. The data collection method is by interview, document review, observation, and triangulation by comparing the data obtained. This study found that the implementation of SPIP in BRIN's ORPA environment is not optimal because it still has at least 3 shortcomings from elements of the control environment, risk assessment, and control activities. In addition, the implementation of SPIP in ORPA BRIN is also still constrained by 4 main problems, namely the lack of human resource competence, the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of SPIP, the lack of awareness in maintaining and implementing asset management and security, and the lack of accuracy of financial statement information. To increase the effectiveness of the implementation of the SPIP, this study recommends a new SPIP model which contains 58 efforts that need to be made in implementing the SPIP. Of these efforts, there are 16 new efforts that are improvements to the SPIP model that has been implemented by BRIN's ORPA so far.

Keywords: *Risk Assessment, Asset Management, Government Internal Control System, Organizational Performance*

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Permasalahan.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	24
1. Tinjauan Kebijakan.....	24
2. Tinjauan Teoritis.....	27
C. Prinsip Dasar Pengendalian Internal.....	28
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	31
2. Sistem Pengendalian Internal Versi COSO.....	33
3. Faktor-faktor dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	39
D. Kerangka Berpikir.....	43
METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Metode Penelitian.....	44
B. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Wawancara.....	45
2. Telaah Dokumen.....	46
3. Observasi.....	47

B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
1. Mengklasifikasi Materi Data	48
2. Validasi Data	48
3. Analisis Data	48
HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa	50
1. Visi dan Misi ORPA BRIN.....	53
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ORPA BRIN.....	55
B. Penyajian Data dan Pembahasan.....	56
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SPIP di ORPA BRIN	56
a. Faktor Sumber Daya Manusia.....	57
b. Faktor Sarana dan Prasarana	78
c. Faktor Pengelolaan Aset	84
d. Faktor Pelaporan Keuangan.....	86
2. Model Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa di Badan Riset dan Inovasi Nasional.....	94
b. Validasi Model SPIP pada ORPA BRIN	108
KESIMPULAN DAN SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Register Transaksi Harian Persediaan Masuk (Pembelian) pada Aplikasi SAKTI untuk periode Tahun 2022	5
Tabel 1.2. Daftar Rincian Temuan Aset tetap.....	6
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1. Daftar Key Informant Person	45
Tabel 3.2. Dokumen yang Dibutuhkan Untuk Telaah Dokumen.....	46
Tabel 4.1. Tabel Daftar Pemangku Kepentingan Badan Riset dan Inovasi Nasional	79
Tabel 4.2. Upaya-Upaya Tambahan Dalam Mengimplementasikan SPIP	105



POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Capture SPK Nomor 0014/ORPA-1/SPK/5/2022.....	7
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Negara.....	28
Gambar 2.2. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern	35
Gambar 2.3. Kerangka berpikir Analisis Penilaian Risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional.....	43
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa.....	51
Gambar 4.2. Komposisi SDM ORPA Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2022	52
Gambar 4.3. Komposisi SDM Periset ORPA tahun 2022 Berdasarkan Jenjang Jabatan.....	52
Gambar 4.4. Rapat Koordinasi Manajemen Risiko ORPA BRIN	70
Gambar 4.5. Rapat Review Risiko dan Hasil Evaluasi Risiko di Lingkungan ORPA BRIN	73
Gambar 4.6. Penyusunan Profil Risiko dan Mitigasi Risiko ORPA 2024 didampingi APIP	75
Gambar 4.7. Model Implementasi SPIP di ORPA BRIN	95
Gambar 4.8. Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi SPIP	97
Gambar 4.9. Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Implementasi SPIP	100
Gambar 4.10. Pengaruh Faktor Pengelolaan Aset Terhadap Implementasi SPIP.....	102
Gambar 4.11. Pengaruh Faktor Pelaporan Keuangan Terhadap Implementasi SPIP.....	103


POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	117
Lampiran 2. Proposal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa.....	118
Lampiran 3. Panduan Wawancara Informan.....	119
Lampiran 4. Rekaman Hasil Wawancara dengan Kepala ORPA BRIN	122
Lampiran 5. Rekaman Hasil Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen ORPA	125
Lampiran 6. Rekaman Hasil Wawancara Dengan Satuan Tugas SPIP (Husni Wahyu)	127
Lampiran 7. Rekaman Hasil Wawancara Dengan Satuan Tugas SPIP (Misran).....	129
Lampiran 8. Rekaman Hasil Wawancara Dengan APIP (Sinta).....	131
Lampiran 9. Rekaman Hasil Wawancara Dengan APIP (Bona).....	133
Lampiran 10. Rekaman Hasil Wawancara Dengan APIP (Danang).....	135
Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup.....	137



POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi birokrasi digambarkan sebagai penerapan terus menerus dari nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang melekat dalam good governance pada struktur administrasi pemerintahan. Setiap instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan akuntabilitas melalui penggunaan unit pemantauan internal dan eksternal yang sudah ada sebelumnya atau mekanisme kontrol untuk mengawasi operasi keuangan daerah.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempunyai makna khusus bagi pimpinan atau manajemen, dikarenakan SPI merupakan lapisan terdepan dari pengawasan, yang merupakan pilar pendukung atas pertahanan apabila terjadi penyimpangan dan hambatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja SPI juga dievaluasi oleh BPK dengan menerbitkan kutipan hasil laporan keuangan negara dan audit kinerja. SPI diakui efektif jika sistemnya direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan sedemikian rupa sehingga tujuan pemerintah tercapai.

Setiap pengeluaran anggaran perlu didukung oleh referensi yang konkrit dan kerangka awal yang menguraikan alasan penyusunan anggaran, oleh karena itu sistem pengendalian sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Agar maksud dan tujuan tersebut tercapai, maka proses perencanaan harus mengikuti sistem pengendalian keuangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Setiap anggota staf sangat penting untuk keberhasilan lembaga, karena Kepala Lembaga bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan, mekanisme kontrol, pemantauan, dan penilaian. Semua SPI mengandung batasan yang terikat. Salah satu keterbatasan ini adalah faktor manusia dalam metode pengendalian. Kesalahpahaman karyawan tentang perintah, kesalahan, ketidakhadiran, dan kerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar pemerintahan dapat menyebabkan hilangnya manfaat tertentu. Pembatasan kedua adalah karena SPI beroperasi dalam setting yang selalu berubah. Oleh karena itu, pergeseran iklim politik, prioritas legislasi, dan perkembangan teknologi akan berdampak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan modifikasi terhadap SPI yang tentu saja memiliki konsekuensi lebih lanjut.

Pemangku kepentingan mungkin lebih tenang mengetahui bahwa tujuan publik akan tercapai berkat proses kontrol. Metrik kontrol mencakup hal-hal seperti keakuratan pelaporan keuangan, keamanan aset, kemanjuran program dan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi. Akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dalam penyelenggaraan negara. Negara telah memberlakukan sejumlah ketentuan hukum yang dirancang untuk memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut.

Akuntabilitas dan transparansi daerah yang lebih besar akan dihasilkan dari semua pemerintah daerah melakukan kegiatan pengendalian dalam semua kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Mengurus uang. terorganisir dengan baik; efektif; hemat. Itulah mengapa penting untuk memiliki sistem yang dapat memastikan pelaporan yang akurat tentang pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan operasi pemerintah yang efisien. melindungi aset daerah dan memupuk budaya hukum. Undang-undang tersebut merupakan ekspresi dari keinginan untuk merestrukturisasi ekonomi negara dan panggilan untuk penyesuaian mendasar dengan cara keuangan pemerintah ditangani.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu tumpuan kehidupan bangsa, sebagai satu-satunya auditor eksternal, dan telah dikukuhkan perannya sesuai dengan Perubahan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini menyiratkan bahwa audit di sektor publik telah diakui secara eksplisit dan jelas oleh undang-undang. Dalam memutuskan apa yang akan diperiksa dan seberapa teliti, BPK dalam perannya sebagai pengawas eksternal selalu melihat kokohnya Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pengendalian intern diasumsikan menyeluruh di seluruh kegiatan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, dengan sumber daya manusia sebagai faktor penentu tingkat kepercayaan yang diberikan. Dengan pemikiran ini, kami menyusun bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan penerapan sistem yang sebenarnya. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dikembangkan secara holistik dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria penilaian efektivitas, dan kemajuan teknologi informasi.

Untuk membantu pelaksanaan Paket Reformasi Keuangan Negara ke arah Good Governance atau tata pemerintahan yang baik dan Good Government, maka diterbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Konsep pengendalian intern yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013) (COSO)* menjadi dasar Sistem Pengendalian Intern pemerintah yang menggunakan ERM (*Enterprise Risk Management*), IC (*Internal Control*), dan FD (*Fraud Deterrence*). untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi. Agar bisnis apa pun berhasil dalam jangka panjang, ia harus mematuhi prinsip-prinsip inti COSO tentang manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik. *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Internal Control* merupakan aspek-aspek SPI yang telah diterapkan di lingkungan pemerintahan di seluruh dunia dan dirujuk dalam SPIP. Moeller (2013) mengibaratkan model pengendalian intern versi Coso seperti kubus rubik, di mana kelima elemen tersebut saling memperkuat satu sama lain berdasarkan struktur organisasi, termasuk kepatuhan pelaporan operasi keuangan melalui aktivitas yang efisien dan efektif. , pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, penyimpanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan

Dengan mempertahankan otoritas, BRIN berada dalam posisi untuk mengawasi pelaksanaan proyek dan meningkatkan kepercayaan pada kemampuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menerapkan elemen inti SPIP Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Internal di dalam BRIN akan membantu organisasi mencapai tujuannya.

Pengendalian intern menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut.

1. Terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat
2. Terselenggaranya penilaian risiko
3. Terselenggaranya kegiatan pengendalian
4. Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi
5. Terselenggaranya kegiatan pemantauan intern

Pasal SPI 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang GPI dan SPI mengatur bahwa suatu lembaga hanya dapat menggunakan GPI dan SPI apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut: tercapainya tujuan penyelenggaraan

pemerintahan negara; keandalan pelaporan keuangan; perlindungan aset negara; dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Perpres No. 74 Tahun 2019 membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mandatnya meliputi penelitian dan pengembangan teknologi; mempelajari dan menerapkan kemajuan teknologi; dan mengintegrasikan penemuan dan terobosan baru. Saat BRIN didirikan, diidentifikasi pada saat serah terima ex Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) masih banyak kelemahan yang berpengaruh pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada Tahun 2021 BRIN diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dengan dua alasan "Pengecualian". Kedua alasan tersebut yaitu salah satunya masih rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi atas temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada tahun 2023, BPK kembali menemukan permasalahan dalam laporan keuangan ORPA BRIN. Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan masalah kepatuhan dalam mengimplementasikan Undang-Undang serta efektivitas pengendalian intern. Kelemahan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Instansi Pemerintah Indonesia secara umum terjadi karena masih banyak dijumpai keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Pimpinan Instansi Pemerintah masih belum sepenuhnya sadar pentingnya sistem pengendalian intern;
2. Perspektif Pimpinan Instansi Pemerintah dan Auditor terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai;
3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil baik secara sengaja maupun tidak sengaja;

Inspektorat Utama BRIN juga sudah melakukan audit terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat Utama BRIN juga melakukan uji petik konfirmasi. Pada Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Belanja, Pendapatan, dan BMN (Aset Tetap, Aset Lainnya dan Persediaan) Tahun Anggaran 2022 Nomor : B-2861/II.10.1/PA.01.00/10/2022 Tanggal : 31 Oktober 2022. Secara umum sistem pengendalian manajemen pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Tahun Anggaran 2022 telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan

dalam unsur-unsur sistem pengendalian manajemen seperti yang diuraikan dalam hal-hal berikut :

- a) Ketidackermatan dalam Penatausahaan Persediaan PR Teknologi Penerbangan 1) Hasil telaah atas dokumen pengadaan bahan penelitian Pusat Riset Teknologi Penerbangan pada SPK Nomor 0001/ORPA-1/SPK/3/2022, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 0001/ORPA-1/BAHP/8/2022 dan Faktur Nomor 069/F—ANI/VIII/2022 berupa Pengadaan Bahan Penelitian Spesimen Joining Matrial Komposit terdapat perbedaan pencatatan persediaan berdasarkan Register Transaksi Harian Persediaan Masuk (Pembelian) pada Aplikasi SAKTI untuk periode Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Register Transaksi Harian Persediaan Masuk (Pembelian) pada Aplikasi SAKTI untuk periode Tahun 2022

SPK 0001/ORPA-1/SPK/3/2022						BAHP 0001/ORPA-1/BAHP/8/2022		faktur 069/F--ANI/VIII/2022			RTH Pembelian Persediaan pada SAKTI		
No	Nama Barang	Vol	satuan	harga satuan	total harga	Vol	satuan	Vol	harga satuan	total harga	Vol	harga satuan	total harga
1	Resin - Repoxy R800 EX	32	kg	140.800	4.505.600	32	kg	32	140.800	4.505.600	32	140.800	5.632.000
14	Crestabond M1-30 400ml	6	Catridges	2.580.650	15.540.000	6	catridges	6	2.580.650	15.540.000	6	2.590.000	15.540.000
17	pembuatan specimen menggunakan waterjet: - joggle lap joint - 1 (bahan komposite)	11	Panel	586.600	6.452.600	11	panel	11	586.600	6.452.600	11	500.450	5.504.950
18	- joggle lap joint - 2 (bahan komposite)	11	Panel	586.600	6.452.600	11	panel	11	586.600	6.452.600	11	500.450	5.504.950
19	Katalis-H ; qty 1kg	3	kg	384.000	1.152.000	3	kg	3	384.000	1.152.000	3	384.000	1.920.000
22	sarung tangan, sensi gloves latex UK (1 pak = 100pcs)	2	pak	120.900	241.800	2	pak	2	120.900	241.800	2	121.350	242.700

Sumber : LHA Ketaatan atas Pengelolaan Belanja, Pendapatan, dan BMN (Aset Tetap, Aset Lainnya dan Persediaan) Tahun Anggaran 2022 Nomor : B-2861/II.10.1/PA.01.00/10/2022

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan tim BMN ORPA bahwa benar ada kesalahan input di SAKTI dan akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keterangan serta perbaikan di Aplikasi SAKTI. Berdasarkan hasil cek fisik pada gudang persediaan Pusat Riset Teknologi Penerbangan diketahui bahwa bahan penelitian pengadaan TA 2022 sebagian besar belum dibuatkan kartu persediaan.

- b) Terdapat aset tetap senilai Rp52.200.000,00 hasil belanja penambahan nilai peralatan dan mesin yang belum dicatat sebagai penambahan nilai pada BMN awal. Pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2022, ORPA telah melaksanakan pengadaan belanja modal berupa belanja penambahan nilai peralatan dan mesin pada PR Teknologi Penerbangan dan PR Teknologi Roket, yaitu:

Tabel 1.2. Daftar Rincian Temuan Aset tetap

No	Paket Pekerjaan	No. Kontrak	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Pengadaan (Rp)	Lokasi Barang
1.	Pengadaan Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Pusat Riset Teknologi Penerbangan berupa Random Access Memory (RAM)	0017/ORPA-1/SP/9/2022	Kingston FURY IMPACT Seri Andal SODIMM 16GB DDR4 3200MHz CL20	4 buah	5.200.000	Lab. Aerodinamika – Pustekbang
2.	Pengadaan Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Pusat Riset Teknologi Penerbangan	0064/ORPA-1/SPK/8/2022	Modifikasi Alat Vacuum Chamber: - Dudukan Chamber (Karet Baja Chamber Kapasitas 1000kg, 10x10x60cm) - Modul Motor Penggetar (0.3kW/3PH/4kN/1500rpm) - Pegas/Spring Mounting (Type NSV-C, 600kg) - Dudukan Motor Getar (Plat Stainless/Baja, Tebal 5mm) - Mur dan Baut (Baja Stainless dan perlengkapan) - Power Listrik 3 phase (16A/3phase/380V) beserta kabel power	1 paket	47.000.000	Lab. AP – Pustekroket
Total Nilai Pengadaan					Rp52.200.000,00	

Sumber : LHA Ketaatan atas Pengelolaan Belanja, Pendapatan, dan BMN (Aset Tetap, Aset Lainnya dan Persediaan) Tahun Anggaran 2022 Nomor : B-2861/II.10.1/PA.01.00/10/2022

Belanja penambahan nilai peralatan dan mesin tersebut telah dicatat pada Laporan Barang Pengguna UAKPB ORPA. Namun demikian, penambahan nilai tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan nilai atas BMN yang saat ini tidak lagi tercatat pada Laporan Barang Pengguna UAKPB ORPA (BMN tersebut sudah berpindah ke UAKPB Sekretariat Utama).

- c) Penatausahaan Barang Persediaan Pada Dua Unit Kerja di ORPA Kurang Tertib. Hasil telaah atas dokumen pengadaan bahan penelitian Pusat Riset Teknologi Roket pada SPK Nomor 0014/ORPA-1/SPK/5/2022 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 0014/ORPA-1/BAHP/6/2022 berupa Pengadaan Bahan Baku Assembling terdapat pembelian Handtap M5 sebanyak 4pcs dengan harga satuan Rp 618.000,- dan Handtap M6 sebanyak 4pcs dengan harga satuan Rp670.000. Hasil pemeriksaan atas proses pencatatan, pengakuan, pelaporan, pengungkapan persediaan berdasarkan Register Transaksi Harian Persediaan Masuk (Pembelian) pada Aplikasi SAKTI untuk periode Tahun 2022, ditemukan kesalahan input Handtap M5 dicatat sebagai Handtap M6.



ORGANISASI RISET PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (LAPAN)
 Jalan Pemuda, Peris No. 1, Rawamangun, Jakarta 13320
 Telepon: (021) 4892802, Surel: lap@lap.brn.go.id
<http://www.lapan.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: ORGANISASI RISET PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (OR PA) BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) NOMOR SPK : 0014/ORPA-1/SPK/5/2022 TANGGAL SPK : 27 Mei 2022				
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak :	Maya Kristanti, S.E.				
	PT. TIGA PUSAKA SAMUDRA				
	NPWP : 31.336.725.2-411.000				
	Alamat : Granada Square Blok I No.23A, Sektor 12-3 BSD City, Serpong -Tangerang Selatan 15318				
Nama Penyedia	Nama Rekening : TIGA PUSAKA SAMUDRA Nomor Rekening : 7430145872 Nama Bank : Bank Syariah Indonesia				
PAKET PENGADAAN:	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 0062/PP-ORPA-1/PL.01.01/5/2022 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 11 Mei 2022				
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 0066/PP-ORPA-1/PL.01.01/5/2022 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Tanggal 18 Mei 2022				
SUMBER DANA:	Dibebankan atas DIPA Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Nomor: SP DIPA-124.01.1.690504/2022 Tahun Anggaran 2022 untuk Mata Anggaran Keptatan: 124.01.KB.6892.SDB.01.00.001.051.A.521821 Rp.151.117.000 124.01.KB.6892.SDB.01.00.001.051.A.521211 Rp.47.425.000				
	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp198.542.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:				
No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
A.	124.01.KB.6892.SDB.01.00.001.051.A.521821				
1	Adhesive Multi metal	3	pcs	14.896.000	44.688.000
2	Gasket	60	pcs	50.000	3.000.000
3	Seal Viton	100	meter	120.000	12.000.000
4	Lem Destone	30	pcs	40.000	1.200.000
5	Adhesive Thread	4	pcs	750.000	3.000.000
6	Inhibitor scraper	5	pcs	348.000	1.740.000
7	WD 40	10	pcs	79.700	797.000
8	UV Chopped Graphite Fibers	8	lbs	1.500.000	12.000.000
9	High Temp Adhesive	3	pcs	12.800.000	37.800.000
10	Flash tape	10	pcs	500.000	5.000.000

11	Grease	20	pcs	85.000	1.700.000	
12	Solid Carbide Fiberglass Bur Bit for Routers	2	pcs	700.000	1.400.000	
13	Perma-Git Jigsaw Blades	10	pcs	100.000	1.000.000	
14	Mata bor 2 mm	5	pcs	22.000	110.000	
15	Mata bor 2,5 mm	5	pcs	22.000	110.000	
16	Mata bor 3 mm	5	pcs	22.000	110.000	
17	Mata bor 3,5 mm	5	pcs	22.000	110.000	
18	Mata bor 4 mm	5	pcs	25.000	125.000	
19	Mata bor 5 mm	5	pcs	35.000	175.000	
20	Mata bor 6 mm	5	pcs	46.000	230.000	
21	Mata bor 7 mm	5	pcs	58.000	290.000	
22	Mata bor 8 mm	5	pcs	70.000	350.000	
23	Mata bor 10 mm	5	pcs	117.000	585.000	
24	Mata bor 10,5 mm	5	pcs	136.000	680.000	
25	Mata bor 12 mm	5	pcs	182.000	910.000	
26	Mata bor 14 mm	5	pcs	453.000	2.265.000	
27	Mata bor 16 mm	5	pcs	580.000	2.900.000	
28	Handtap M3	4	pcs	585.000	2.340.000	
29	Handtap M4	4	pcs	585.000	2.340.000	
30	Handtap M5	4	pcs	618.000	2.472.000	
31	Handtap M6	4	pcs	670.000	2.680.000	
32	Handtap M8	4	pcs	755.000	3.020.000	
33	Handtap M10	4	pcs	875.000	3.500.000	
34	Handtap M12	4	pcs	1.175.000	4.700.000	
					Total Sub A	151.117.000
B.	124.01.KB.6892.SDB.01.00.001.051.A.521211	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	
1	Jas Hujan eiger gravitas convertible	15	Buah	599.000	8.985.000	
2	Batu Karja	15	Buah	500.000	7.500.000	
3	Strap wrench	10	Buah	2.000.000	20.000.000	
4	Wall Brush	50	Buah	9.800	490.000	
5	Plastic Gloves Nitril	20	Box	198.000	3.960.000	
6	Plastic Gloves Kain	30	Luas	55.000	1.650.000	
7	Resco Hand Cleaner	25	Buah	70.000	1.750.000	
8	Majan pulih	20	Kg	80.000	1.600.000	
9	Pemotong Bahan Penelitian	20	Buah	24.500	490.000	
10	Thiner Impate 1 Liter	20	Buah	50.000	1.000.000	
					Total Sub B	47.425.000
					Total	198.542.000
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	: 27 Mei s.d 07 Juli 2022, 41 (lima puluh) hari kalender					
ALAMAT PENGIRMAN PEKERJAAN	: Pusat Riset Roket Jalan Raya LAPAN, Mekar Sari, Bogor Parungpanjaj, Bogor, Jawa Barat 16350					

Matriks Temuan BPK dan Hasil Audit Ketaatan Tahun 2022 dan 2023		
Hasil Temuan/Permasalahan		
No	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Ketidaccermatan dalam Penatausahaan Persediaan PR Teknologi Penerbangan, Hasil telaah atas dokumen pengadaan bahan penelitian Pusat Riset Teknologi Penerbangan pada SPK Nomor 0001/ORPA-1/SPK/3/2022, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 0001/ORPA-1/BAHP/8/2022 dan Faktur Nomor 069/F-- ANI/VIII/2022 berupa Pengadaan Bahan Penelitian Spesimen Joining Matrial Komposit terdapat perbedaan pencatatan persediaan berdasarkan Register Transaksi Harian Persediaan Masuk (Pembelian) pada Aplikasi SAKTI untuk periode Tahun 2022	Kelemahan dalam penatausahaan BMN pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa berupa Terdapat BMN ORPA Tahun 2022 berupa Peralatan dan Mesin (132111) berjumlah 82 unit dengan nilai Rp1.245.579.000 yang belum diserahkan kepada Kuasa Pengguna Barang Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
2	Terdapat aset tetap senilai Rp52.200.000,00 hasil belanja penambahan nilai peralatan dan mesin yang belum dicatat sebagai penambahan nilai pada BMN awal. Pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2022, ORPA telah melaksanakan pengadaan belanja modal berupa belanja penambahan nilai peralatan dan mesin pada PR Teknologi Penerbangan dan PR Teknologi Roket	Penatausahaan Barang Persediaan pada Satuan Kerja OR Penerbangan dan Antariksa belum dilaksanakan secara tertib
3	Penatausahaan Barang Persediaan Pada Dua Unit Kerja di ORPA Kurang Tertib. Hasil telaah atas dokumen pengadaan bahan penelitian Pusat Riset Teknologi Roket, Hasil pemeriksaan atas proses pencatatan, pengakuan, pelaporan, pengungkapan persediaan berdasarkan Register Transaksi Harian/Persediaan Masuk (Pembelian) pada Aplikasi SAKTI untuk periode Tahun 2022, ditemukan kesalahan input Handtap M5 dicatat sebagai Handtap M6.	Penggunaan MAK Belanja Barang Persediaan Bahan Baku (521821) Tidak Sesuai Peruntukan

Gambar 1.1. Capture SPK Nomor 0014/ORPA-1/SPK/5/2022 dan Matrik temuan 2022 & 2023

Sumber : LHA Ketaatan atas Pengelolaan Belanja, Pendapatan, dan BMN (Aset Tetap, Aset Lainnya dan Persediaan) Tahun Anggaran 2022

Dari ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengendalian Risiko pada ORPA masih banyak memerlukan

pembenahan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada. Pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam melaksanakan kegiatan administrasi maupun penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi roket membutuhkan banyak barang persediaan termasuk barang konsumsi, bahan penelitian/bahan baku, barang proses dan barang jadi, sehingga dalam pengelolaan aset dan barang persediaan harus dipertanggungjawabkan dengan baik dalam Laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Untuk mencapai pengelolaan fiskal nasional yang efisien, efektif, bertanggung jawab dan transparan, diperlukan pengendalian penyelenggaraan negara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki 5 (elemen) yaitu mencakup lingkungan pengendalian, kegiatan penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Menurut Inpres No. 1 Tahun 1989, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Yang Melekat, sistem pengendalian intern menggunakan sistem pengendalian manajemen dengan sistem check and balances. Dalam hal ini pengendalian yang dilakukan lebih ditekankan pada peraturan, sistem, prosedur, dan kebijakan pemerintah (*hard control*). Sebagai alat yang kurang fleksibel dan tidak dapat beradaptasi dengan keadaan baru, *Inherent Supervision* telah gagal untuk mendorong tata pemerintahan yang baik dan administrasi yang transparan yang menjadi lebih penting dalam masyarakat modern. *Soft control* seperti etika, moral, integritas, kejujuran, kedisiplinan, kompetensi, komitmen, dan perangkat lunak lainnya ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar aparatur pemerintah dapat membangun birokrasi yang handal yang mampu mewujudkan tujuannya. SPIP didasarkan pada *COSO Internal Control Framework*, dengan modifikasi tertentu yang disesuaikan dengan keadaan khusus pemerintah Indonesia. SPIP ini dikoordinasikan, pekerjaan berkelanjutan oleh lembaga pemerintah, dan dapat diadaptasi dan kontemporer.

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang tersebut maka dalam Sistem Pengendalian Internal Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa mengungkapkan beberapa hal, antara lain di bawah ini:

1. Kelemahan Penatausahaan Barang Persediaan di ORPA kurang tertib.
2. Output yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan

3. Prosedur yang buruk untuk menginventarisasi aset BMN
4. Barang Milik Negara belum dikelola secara memadai
5. Laporan Keuangan belum dapat dicapai dengan opini WTP secara penuh
6. Adanya temuan dari hasil audit BPK terhadap ORPA BRIN terkait dengan kurangnya kepatuhan dalam mengimplementasikan Undang-Undang serta efektivitas pengendalian intern.

C. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa Pelaksanaan dalam Sistem Pengendalian Intern di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa – BRIN belum optimal?
2. Bagaimana penerapan model Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa-BRIN?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN.
2. Untuk mengetahui model strategis dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN.

E. Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diharapkan dapat menyampaikan rekomendasi bagi pimpinan dan pelaksana untuk melaksanakan Implementasi Sistem Pengendalian Intern di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN agar menjadi lebih baik lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup kesimpulan yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian serta rekomendasi untuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan masing-masing pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi SPIP di lingkungan ORPA BRIN disebabkan oleh sedikitnya 4 faktor yaitu faktor sumber daya manusia, faktor infrastruktur atau sarana dan prasarana, faktor pengelolaan aset, faktor penyusunan laporan keuangan. Implementasi SPIP di lingkungan ORPA BRIN masih belum optimal karena terdapat sejumlah kekurangan dalam mengimplementasikan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian.

Berkaitan dengan unsur lingkungan pengendalian, masih terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan aspek komitmen terhadap kompetensi, penyusunan dan penerapan kebijakan mengenai pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran APIP yang efektif, dan hubungan kerja dengan stakeholders. Sementara itu, mengenai unsur penilaian risiko, ORPA BRIN belum melakukan analisis yang secara spesifik berkaitan dengan risiko-risiko pengelolaan aset. Adapun terkait dengan kekurangan dalam implementasi unsur kegiatan pengendalian, ORPA BRIN belum menyusun kebutuhan pelatihan dan strategi pengembangan sumber daya manusia dalam pengamanan aset. Selain itu, ORPA BRIN juga belum menyusun strategi dalam menerapkan tindakan korektif apabila terdapat persoalan terkait dengan pengamanan dan pengelolaan aset.

2. Berdasarkan kekurangan-kekurangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP, ORPA BRIN agar dapat melakukan perbaikan. Penelitian ini telah menyusun daftar upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh ORPA BRIN dalam mengimplementasikan SPIP pada tabel 4.2. Upaya-upaya tersebut disusun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan implementasi SPIP yang telah dijalankan oleh ORPA BRIN.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan kepada ORPA BRIN adalah sebagaimana berikut:

1. Agar ORPA BRIN melakukan perbaikan dalam proses implementasi SPIP, khususnya yang berkaitan dengan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian. Sebelum mengimplementasikan SPIP, ORPA BRIN perlu terlebih dahulu mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor yang dapat menyebabkan kurang optimalnya proses implementasi SPIP. Beberapa faktor tersebut berkenaan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran individu dalam menjaga dan memelihara aset, serta kurang akuratnya informasi dalam laporan keuangan.
2. ORPA BRIN perlu mempertimbangkan untuk mengimplementasikan upaya-upaya untuk memperbaiki model SPIP yang telah disusun oleh penelitian ini. Terdapat beberapa upaya baru yang perlu dilakukan oleh ORPA BRIN dalam mengimplementasikan SPIP sebagaimana yang dalam tabel 4.2. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah bahwa ORPA perlu melakukan sekurang-kurangnya 5 upaya penegakan etika dan integritas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, menetapkan surat keputusan atau aturan mengenai komitmen terhadap kompetensi, dan melakukan proses seleksi tim satuan kerja berdasarkan sistem merit. Selain itu, ORPA BRIN juga perlu menetapkan strategi pengembangan SDM, menyusun kebutuhan pelatihan dan strategi pengembangan SDM dalam konteks pemeliharaan aset, menyusun dokumen rencana kerja APIP, melakukan evaluasi atas kinerja APIP, hingga membangun sistem informasi akuntansi terpadu yang dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam input transaksi keuangan, ketidaksesuaian informasi, bahkan potensi terjadinya kecurangan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, G. P., & Riharjo, I. B. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(4), 1–15.
- Anindyajati, P., & Dharma, A. V. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Bentuk Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 253–262. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i2.17039>
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (S. *Jurnal Bima Akuntansi*, 6(1), 95–136.
- Arisman, A., Putriyani, A., & Afandi, A. (2018). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif Islam. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 293–304. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8860>
- Ayimpoaya, R. N., Akolgo, D. A., Mbilla, S. A. E., & Gbegble, M. K. (2020). Effects of Risk Assessment, Control Environment and Control Activities on Performance of Listed Banks in Ghana. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 14(4), 18–33. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/v14i430200>
- Burhanuddin, E. (2021). *Pengaruh Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Risiko Terhadap Pengendalian Internal (Studi Pada Dealer Motor Kota Palopo)*. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control—Integrated Framework: Executive Summary, 2012*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Dharmawan, T., & Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 941–948. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7716>
- Farmanta, Y. (2019). Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada kantor inspektorat Kabupaten Buton Utara menuju good governance. *Jurnal Ilmu*

- Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(1), 50–61.
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Pekbis Jurnal*, 12(1), 39–54.
- Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. (2018). *Accounting information systems*. Cengage AU.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–19.
- Hawari, K., & Sari, V. F. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sisten pengendalian internal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3), 1290–1305.
<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.829> Abstract
- Hendriani, S., & Firman, F. (2013). Pengaruh pendidikan dan latihan serta kompetensi terhadap implementasi SPIP guna pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 84–100.
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Indriani, R., & Siswanto, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner*, 7(4), 3006–3017.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>
- Lonto, M. P., & Halim, A. (2012). *Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung: Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap good governance*. Universitas Gadjah Mada.
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2017). Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”*

- 8(2), 20–29. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 133–143. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moeller, R. R. (2013). *Executive's guide to Coso internal controls: understanding and implementing the new framework*. John Wiley & Sons.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116. <https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.95.2011>
- Nurokhman, M., & Primasari, D. (2023). Analisis Control Environment Evaluation (CEE) dalam Penerapan SPIP Terintegrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2616–2633.
- Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 78–86. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.10>
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perilaku Kecurangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016. (2016). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Pratiwi, W. (2012). Analisis penerapan sistem pengendalian intern (Studi kasus: Pemerintah Kabupaten Bungo). *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*, 7(2), 82–103.
- Purba, M. C., & Zulkarnaini, Z. (2013). Analisis pelaksanaan unsur penilaian resiko.

- Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(1), 51–58.
- Putra, A. A. S. (2016). *Analisis Penilaian Risiko (Studi Kasus Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Padang Panjang)*. Universitas Andalas.
- Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD Kota Bandung). *Banque Syar'i*, 4(1), 33–67.
- Sinaga, J. I. (2023). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)(Studi Kasus pada Kementerian Keuangan)*. Universitas Gadjah Mada.
- Sinulingga, P. S., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI. *Jurnal Manajemen*, 8(1), 89–106. <https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5198>
- Steinbart, P. J., & Romney, M. B. (2018). *Accounting information systems*. Pearson.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII.*, 1–25.
- Suherlan, D., & Mulyandani, V. C. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 258–264. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4131>
- Tjandra, W. R. (2006). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Grasindo.
- Trijayanti, T. (2015). Analisis penerapan SPIP atas prosedur pengeluaran kas di biro perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal KIAFE*, 4(2).
- Wicaksono, W. C. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Intern Di Sektor Pemerintahan (Persepsi Pegawai Pada Dinas-Dinas Kota Semarang). *Skripsi. Universitas Negeri Semarang*.
- Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi*

Dan Auditing, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>
Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2015). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal:
Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi
Multiparadigma*, 4(2), 20–27. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6003>



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A